

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan tempat untuk melakukan proses belajar mengajar dan juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Tujuan dari sekolah adalah mengajarkan untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa. Sekolah menjadi sebuah tempat atau wadah yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Proses pendidikan dapat mendukung kualitas sekolah. Oleh karena itu, kualitas sekolah perlu diperhatikan agar dapat menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif.

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.¹ Pasal ini mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pasal 31 ayat 1 diatas segera diikuti oleh pasal 31 ayat 2 yang menyatakan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.² Selanjutnya pasal 31 ayat (3) menyatakan Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.³

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3

Dalam semangat UUD 1945 pendidikan ditujukan bagi rakyat keseluruhan dengan perhatian utama pada rakyat yang tidak mampu agar setiap warga dapat mengembangkan dirinya sebaik-baiknya yang pada gilirannya merupakan pilar bagi perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sejalan dengan UUD 1945, Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.⁴ Dalam pasal ini yang dimaksud dengan biaya adalah biaya SPP dan uang gedung.

Pendidikan Dasar menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2 adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau dalam bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun maka pemerintah menyediakan biaya operasional dan nonpersonal sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam

⁴ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2

pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Menurut Mulyasa, bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya.⁵ Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran.

Pemerintah Indonesia telah menyusun skala prioritas untuk mencerdaskan bangsa dan hal tersebut berawal dari bertambahnya anggaran pendidikan atau terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Selama lebih enam dekade pembangunan pendidikan dilaksanakan, sudah banyak terobosan-terobosan berarti yang dilakukan pemerintah, baik dalam konteks perluasan akses, peningkatan mutu maupun konteks membangun citra pendidikan nasional. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Pada prinsipnya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu

⁵ Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya

pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran yaitu siswa-siswi yang berhak atas mendapatkannya bantuan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan bahwa BOSP Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan yang telah berhasil menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Termasuk bagi satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi terbawah yang menunjukkan kemajuan. Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 154 Tahun 2023, besaran satuan biaya Dana BOSP Kinerja pada jenjang SD diberikan sebesar Rp22.500.000, jenjang SMP sebesar Rp35.000.000, jenjang SMA sebesar Rp45.000.000, jenjang SLB sebesar Rp36.250.000, dan satuan pendidikan kesetaraan sebesar Rp45.000.000.⁶

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi merupakan salah satu fungsi administrasi keuangan yaitu dimulai dari pengajuan pencairan biaya, transaksi kegiatan berupa serah terima uang dan pembuatan kwintasi, Pembukuan (*Accounting*) merupakan pola kegiatan yang sangat pokok dalam sistem administrasi keuangan yang tertib. Pembukuan bertujuan agar dana yang dipakai dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif guna membiayai kegiatan. Pembukuan yang efektif mempunyai indikator mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari prosedur anggaran yang telah ditentukan, mencegah adanya

⁶ Nikita Rosa, "30 Ribu Sekolah Dapat Dana BOSP Kinerja Kemajuan Terbaik 2023, Bagaimana Cara Dapatnya?". <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6900624/30-ribu-sekolah-dapat-dana-bosp-kinerja-kemajuan-terbaik-2023-bagaimana-cara-dapatnya#:~:text=Berdasarkan%20Kepmendikbudristek%20Nomor%20154%20Tahun,pendidikan%20kesetaraan%20sebesar%20Rp45.000.000/> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 01.25.

pemborosan dalam pembiayaan, mencegah defisit anggaran dan melakukan Pembuktian (*Verifikasi*) bahwa anggaran yang ada telah digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan pembukuan dan sistem transaksi.

Menurut (Mulyasa, 2006) bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁷

Dalam suatu proses belajar dan mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Menurut A. Arsyad bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan⁸. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa sering merasa bosan dan tidak memahami materi pelajaran adalah penyampain materi pelajaran yang kurang menarik dan kurangnya komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran.

Menurut Djamarah dan Zain Penggunaan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan perhatian pebelajar terhadap relevansi proses belajar, meningkatkan motivasi dan membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah serta memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual serta mendorong individu untuk belajar.⁹

⁷ Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

⁸ A. Arsyad (2011), *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

⁹ Djamarah B, S Dan Zain (2006). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Permasalahan yang dihadapi SDN Kramat Jati 11 menurut hasil observasi peneliti dan menurut pandangan dari orang tua murid menemukan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam mengoptimalkan media pembelajaran yaitu kurangnya media pembelajaran seperti proyektor yang belum menyeluruh di tiap kelasnya dan belum efektifnya pengawasan pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah dari orang tua murid. Hasil dari kurangnya sumber media pembelajaran berpengaruh kepada siswa dalam proses pembelajaran dan guru sulit untuk memberi materi pembelajaran terkendala oleh media pembelajaran yang kurang efektif.

Media pembelajaran yang memadai akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses pendidikan. Namun yang lebih penting adalah tidak sekedar tersedia secara lengkap media pembelajaran tersebut jika tidak dilakukan manajemen yang baik, maka apalah artinya semua ketersediaan media pembelajaran tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang besar bagi tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Dari latar belakang inilah penulis mengangkat judul mengenai “Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengoptimalkan Media Pembelajaran di SDN Kramat Jati 11”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah oleh peneliti adalah Bagaimana strategi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam mengoptimalkan media pembelajaran di SDN Kramat Jati 11?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut untuk mengetahui strategi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam mengoptimalkan media pembelajaran di SDN Kramat Jati 11.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis yaitu bahwa penulisan ini berguna untuk ilmu pengetahuan, karena diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi serta masukan yang berguna sebagai literatur ilmiah.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan masukan kepada pemerintah dan pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dapat menambah dan memperluas wawasan penelitian dalam penulisan terhadap permasalahan yang diangkat, serta pembelajaran dan pengalaman yang berharga untuk mengapresiasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka peneliti memerlukan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan gambaran dari isi penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan kajian teori. Bab ini membahas tentang teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini. bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis data dan pembahasan yang memuat penyajian dan analisis data. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai hasil analisis pembahasannya yang disesuaikan dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat dan dapat menjadi rekomendasi maupun masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dikemudian hari.

